





# LAPORAN

# **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



### **DAFTAR ISI**

DAFT	ΓAR ISI	i
BAB :	I	1
PEND	DAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3	Maksud dan Tujuan	2
BAB :	II	3
PENG	GUMPULAN DATA SKM	3
2.1	Pelaksana SKM	3
2.2	Metode Pengumpulan Data	3
2.3	Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4	Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5	Penentuan Jumlah Responden	5
BAB :	III	8
HASI	IL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1	Jumlah Responden SKM	7
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB :	IV	8
ANAL	LISIS HASIL SKM	8
4.1	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	8
4.2	Rencana Tindak Lanjut	8
4.3	Tren Nilai SKM	9
BAB '	v	11
KESI	MPULAN	12
LAME	PIRAN	12
1.	Kuisioner	12
2.	Hasil Pengolahan Data	13
3.	Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM	
4.	Laporan Hasil Tindak Laniut SKM Pada Periode Sebelumnya	17

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PANRB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Barat, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Permen-PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### 1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang telah diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

### **BAB II**

### PENGUMPULAN DATA SKM

### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan pengisian kuesioner digital melalui *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang disebarluaskan lamannya kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yaitu:

- **a. Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- **b. Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- **c. Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **d. Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- **f. Kompetensi pelaksana**: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- **g. Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bappeda Kabupaten Bekasi melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara *online* melalui *website* resmi. Lokasi pengisian survei dapat dilakukan di mana saja, cukup dengan mengakses tautan yang telah disediakan di *Website* Bappeda Kabupaten Bekasi. Dengan metode ini, masyarakat sebagai penerima layanan turut berpartisipasi aktif dalam memberikan penilaian secara objektif, berdasarkan pengalaman layanan yang mereka terima secara langsung.

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, cepat, dan transparan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bappeda Kabupaten Bekasi.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilaksanakan secara periodik sebanyak dua kali dalam setahun, dengan periode setiap 6 (enam) bulan sekali. Proses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan, yang mencakup tahapan pengumpulan data, pengolahan hasil, analisis, hingga pelaporan akhir dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja			
1.	Persiapan	Februari 2025	10			
2.	Pengumpulan Data	Maret-Juni 2025	120			
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2025	2			
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	6			

#### 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 190 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari

Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 129 orang.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, penentuan responden dilakukan berdasarkan estimasi jumlah populasi penerima layanan atau pemohon dari seluruh jenis pelayanan yang tersedia. Mengacu pada data perkiraan tahun 2024, jumlah penerima layanan di Bappeda Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu satu tahun diperkirakan mencapai 190 orang. Jumlah ini menjadi dasar dalam menentukan ukuran sampel untuk survei.

Selanjutnya, responden dipilih secara acak dari berbagai jenis pelayanan yang ada, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan Tabel Krejcie and Morgan. Berdasarkan tabel tersebut, untuk populasi sebesar 190 orang, jumlah minimum responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah sebanyak 127 orang. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil survei dapat merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat secara proporsional, objektif, dan akurat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Bappeda Kabupaten Bekasi.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

### BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 127 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	72	56,69%
		Perempuan	55	43,31%
2	Pendidikan	SLTA	13	10,23%
		DIII	9	7,08%
		SI/D4	79	62,20%
		S2	22	17,32%
		S3	5	3,93%
3	Pekerjaan	PNS	93	73,22%
		Swasta	4	3,14%
		Mahasiswa	8	6,29%
		Lainnya	22	17,2%
4	Jenis Layanan	Asistensi Perencanaan/ Penyusunan Dokumen Perencanaan/ Fasilitasi Bantuan Keuangan	96	75,59%
		Pelayanan Tamu/Kunjungan Kerja	28	22,04%
		Fasilitasi CSR	3	2,36%

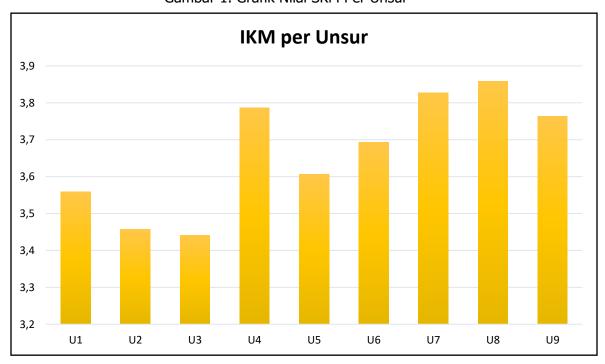
### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan *excel template* olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan												
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
IKM per unsur	3,559	3,457	3,441	3,787	3,606	3,693	3,827	3,858	3,764				
Kategori	A	В	В	A	A	A	A	A	A				
IKM Unit Layanan	91.64 (A atau Sangat Baik)												

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



### BAB IV ANALISIS HASIL SKM

### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- a. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,441. Selanjutnya prosedur layanan yang mendapatkan nilai 3,457 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga persyaratan pelayanan termasuk tiga unsur terendah.
- b. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sarana dan prasarana layanan mendapatkan nilai tertinggi 3,858 dari unsur layanan, dan Kesopanan dan Keramahan Petugas nilai tertinggi kedua 3,827 serta Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,787.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- a. "Mohon tiap permintaan penambahan anggaran bisa direspon".
- b. "Mohon pengisian SIPD tidak di hari libur".
- c. "Penyajian data di website mohon di-update ya".
- d. "Data perencanaan perlu dipublikasi baik melalui media sosial ataupun di dinding supaya dapat diketahui pengunjung dan *vibes*-nya tuh bappeda banget".
- e. "Lebih mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan pada jam kerja dan hari kerja".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan perencanaan perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya, termasuk dalam penjadwalan serta mekanisme tindak lanjutnya.
- b. Prosedur pelayanan masih dianggap kurang jelas dan perlu disosialisasikan kembali agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, khususnya di lingkungan Bappeda Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil evaluasi, disusunlah rencana tindak lanjut sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Rencana tindak lanjut difokuskan pada unsur-unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah dalam survei, sebagai prioritas utama dalam perbaikan. Proses penyusunan rencana ini dilakukan secara partisipatif melalui Rapat Internal Bappeda, dengan mempertimbangkan urgensi, sumber daya yang tersedia, serta dampak perbaikannya terhadap peningkatan kualitas layanan.

Setiap tindak lanjut dikategorikan berdasarkan skala waktu implementasinya, yaitu: Jangka pendek perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 12 bulan, Jangka menengah perbaikan yang memerlukan waktu antara 12 hingga 24 bulan dan Jangka panjang perbaikan dengan cakupan luas atau kompleksitas tinggi yang membutuhkan waktu lebih dari 24 bulan.

Rencana tindak lanjut hasil SKM ini menjadi acuan dalam perbaikan berkelanjutan terhadap sistem dan prosedur pelayanan, serta sebagai bentuk akuntabilitas Bappeda kepada masyarakat. Rincian tindak lanjut per unsur pelayanan dituangkan dalam tabel pada halaman berikut.

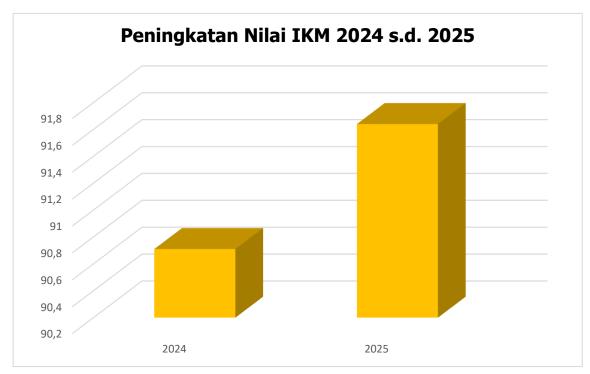
Tabel 4.1.
Rencana Tindak Laniut

		- /			ktu		_
No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	TW I	TW II	TW	TW IV	Penanggung Jawab
1	Waktu Penyelesaian	Evaluasi dan Penyesuaian SOP waktu pelayanan agar lebih efisien			√		Ketua Tim Perencanaan
2	Prosedur Pelayanan	Melaksanakan review/monev terhadap prosedur pelayanan Bappeda			√		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3	Persyaratan Pelayanan	Menyediakan informasi terkait persyaratan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan dipublikasikan media elektronik/non elektronik				√	Ketua Tim Perencanaan

### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dapat dilihat melalui grafik berikut:

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.



### BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Februari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

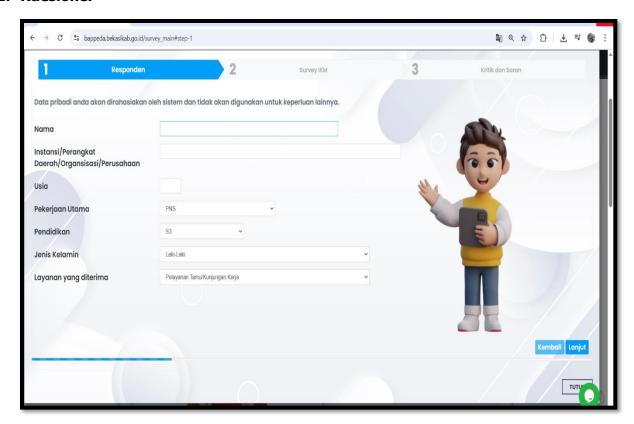
- a. Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,64 (Sangat Baik). Meskipun demikian, nilai SKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.
- b. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, dan persyaratan pelayanan.
- c. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu sarana dan prasarana layanan mendapatkan nilai tertinggi dari unsur layanan, kesopanan dan keramahan petugas serta biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi berikutnya.

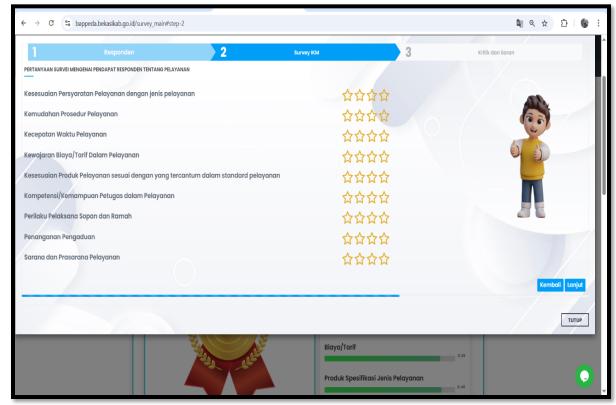
### Cikarang Pusat, 9 Juli 2025 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



### **LAMPIRAN**

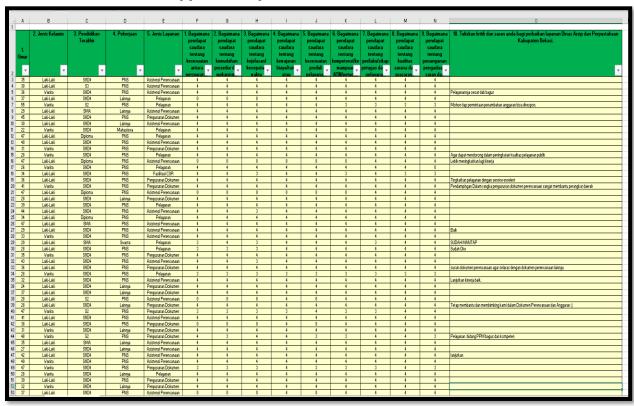
### 1. Kuesioner





Dapat di akses melalui : <a href="https://bappeda.bekasikab.go.id/survey">https://bappeda.bekasikab.go.id/survey</a> main#step-1

### 2. Hasil Olah Data SKM Bapped Kabupaten Bekasi



		SKOR PER	DUITIIN	CANH	Vell el	IDVEL K	EDIIA	SAN NAA	CVADA	KAT	
1	•	SKUK PER							STARA	INA I	
2				BAPPED	A KAB	UPATE	N BEK	ASI			
3	Nomor				D-						
5	Responden	1	2	3	4	rtanyaan 5	6	7	8	9	Σ
6	Responden	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	0	0	0	4	4	4	4	4	4	24
10	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
11	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
17	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
19	14	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
20	15	4	4	4	4	4	4	4	4	0	32
21	16	4	4	3	4	4	3	4	3	3	32
22	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	19	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
25	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
27	22	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
28	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
32	27	3	4	3	4	4	4	3	4	4	33
33	28	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
34	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
36	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
37	32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
	4 > 2	Survei respo	nden	Sheet1	SKOR	Hitun	ig Ha	sil Hitung	JIKM	+	

Unsur pelayanan	Nilai Unsur pelayanan	Nilai Penimbang	Nilai Rata-rata Tertimbang
Persyaratan pelayanan	3,559	0,111	0,395
Prosedur pelayanan	3,457	0,111	0,384
Waktu penyelesaian pelayanan	3,441	0,111	0,382
Biaya atau Tarif pelayanan	3,787	0,111	0,421
Produk Pelayanan	0,401		
Kompetensi petugas pelayanan	3,693	0,111	0,410
Kesopanan dan keramahan petugas	3,827	0,111	0,425
Sarana Prasarana Pelayanan	3,858	0,111	0,429
Penanganan pengaduan	3,764	0,111	0,418
Nilai SK	M		3,666
Indeks Kepuasan	Masyarakat		91,64
Mutu Pelay	anan		Α
Kinerja Unit Po	Sangat Baik		
	Persyaratan pelayanan  Prosedur pelayanan  Waktu penyelesaian pelayanan  Biaya atau Tarif pelayanan  Produk Pelayanan  Kompetensi petugas pelayanan  Kesopanan dan keramahan petugas  Sarana Prasarana Pelayanan  Penanganan pengaduan  Nilai SK  Indeks Kepuasan  Mutu Pelay	Persyaratan pelayanan 3,559  Prosedur pelayanan 3,457  Waktu penyelesaian pelayanan 3,441  Biaya atau Tarif pelayanan 3,787  Produk Pelayanan 3,606  Kompetensi petugas pelayanan 3,693  Kesopanan dan keramahan petugas 3,827  Sarana Prasarana Pelayanan 3,858	Persyaratan pelayanan 3,559 0,111  Prosedur pelayanan 3,457 0,111  Waktu penyelesaian pelayanan 3,441 0,111  Biaya atau Tarif pelayanan 3,787 0,111  Produk Pelayanan 3,606 0,111  Kompetensi petugas pelayanan 3,693 0,111  Kesopanan dan keramahan petugas 3,827 0,111  Sarana Prasarana Pelayanan 3,858 0,111  Penanganan pengaduan 3,764 0,111  Nilai SKM  Indeks Kepuasan Masyarakat



# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Periode Survei: Maret s.d. Juni 2025

**JUMLAH RESPONDEN: 127 ORANG** 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 56,69% 72 Orang 55 Orang



#### **NILAI 9 UNSUR PELAYANAN**



### PERKEMBANGAN HASIL IKM



Keterangan: Warna Merah :1,00 - 2,59 Warna Kuning : 2,60 - 3,06 Warna Biru : 3,07 - 3,53 Warna Biru : 3.54 - 4.00

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Partisipasi anda sangat bermanfaat untuk kemajuan instansi kami, agar kami terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Sukses Perencanaan Sukses Pembangunan

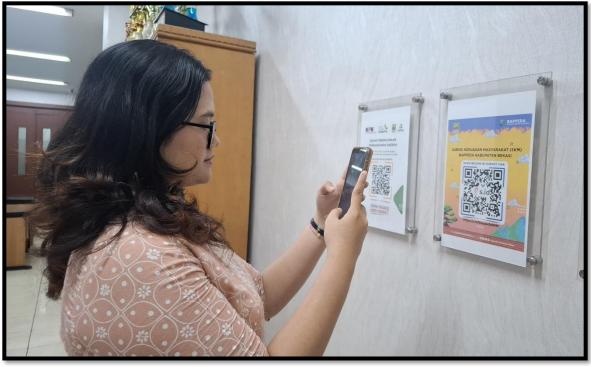
www.bappeda.bekasikab.go.id



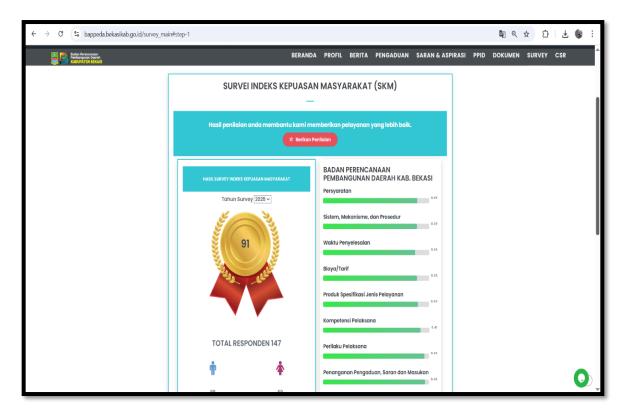
SANGAT BAIK

**□ ∂ f ③** Bappeda Kabupaten Bekasi

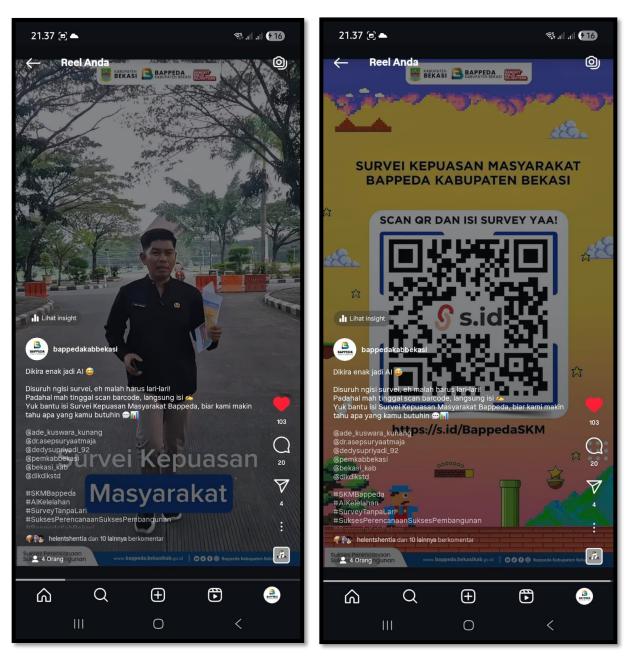
### 3. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



Keterangan Foto: Scan Barcode SKM telah dipublikasi pada dinding pelayanan Bappeda



Keterangan Foto: Nilai SKM dapat dilihat secara online pada Website Bappeda Kabupaten Bekasi



Keterangan Foto: Bappeda telah membuat konten tentang Isi Survey SKM Bappeda dan dipublikasikan pada media social Instagram Bappeda Kabupaten Bekasi.







# **LAPORAN** HASIL TINDAK LANJUT

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN BEKASI



# Kata Pengantar

000

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi Semester 1 Tahun 2024. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini menyampaikan Tindak Lanjut Hasil SKM mengenai pelayanan publik di BAPPEDA Kabupaten Bekasi. Melalui hasil survey yang dilaksanakan periode tahun 2024, diharapkan memberikan gambaran capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Bekasi. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.



Bekasi, 25 September 2024

### PIt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



01. •••

# Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Dasar Hukum
- 3 Tujuan
- 4 Ruang Lingkup
- 5 Hasil SKM
- Rencana
  Tindak Lanjut
- 7 Tindak Lanjut
- 8 Hasil Tindak Lanjut
- 9 Kesimpulan



### Pendahuluan

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 terkait Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap warga negara dan penduduk baik barang, jasa, dan atau pelayanan administratif.

BAPPEDA Kabupaten Bekasi memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Komitmen tersebut dibuktikan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil evaluasi kemudian diolah dan dibuat laporan, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan. Tindak lanjut dari survei tersebut adalah usaha untuk terus mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BAPPEDA Kabupaten Bekasi.

Pada Semester 1 Tahun 2024, BAPPEDA Kabupaten Bekasi telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada pengguna layanan di BAPPEDA Kabupaten Bekasi yang terdiri dari beberapa pelayanan. Hasil dari survei kepuasan masyarakat pada pengguna layanan di BAPPEDA Kabupaten Bekasi perlu dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan dokumen hasil tindak lanjut survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BAPPPEDA Kabupaten Bekasi Tahun 2023.



02 \*\*\*

# Dasar Hukum



- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 4 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.







# Tujuan

**01.** Membantu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara terus menerus.



04. •••

# **Ruang Lingkup**

- Ol. Persyaratan
- **02.** Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- **03** Waktu Penyelesaian
- 04. Biaya / Tarif
- **05.** Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- **06.** Kompetensi Pelaksana
- **07.** Perilaku Pelaksana
- 08. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- **09.** Sarana dan Prasarana



05. \*\*\*

# Hasil SKM Bappeda



Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner, diperoleh nilai mutu pelayanan pada Bappeda Kabupaten Bekasi Semester I Tahun 2024 dipersepsikan **Sangat Baik** oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh sebesar **90.75**.

Tabel 6.1 Jumlah Nilai Rata-rata Per Unsur dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI	MUTU PELAYANAN
1	Persyaratan	3,673	91,82	A (Sangat Baik)
2	Prosedur	3,587	89,68	A (Sangat Baik)
3	Waktu Pelayanan	3,567	89,18	A (Sangat Baik)
4	Biaya / Tarif	3,577	89,42	A (Sangat Baik)
5	Produk Pelayanan	3,548	88,70	A (Sangat Baik)
6	Kompetensi Petugas	3,606	90,15	A (Sangat Baik)
7	Perilaku Pelaksana	3,731	93,26	A (Sangat Baik)
8	Penanganan Pengaduan	3 <i>,7</i> 12	92,80	A (Sangat Baik)
9	Sarana dan Prasarana	3,673	92,82	A ( Sangat Baik)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perolehan tingkat kepuasan dari pengguna layanan Publik di Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

Jumlah Responden : 104 Orang
 Nilai IKM : 90,75
 Kategori Mutu Pelayanan : A

• Nilai Mutu Pelayanan : Sangat Baik





# Pengolahan Data SKM

Nomor					Pertanyaan					
Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	1	2	2	2	2	2	1	1	2	15
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	3	2	3	4	3	3	3	3	3	27
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
16	0	0	0	0	0	0	4	3	3	10
17	4	3	3	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	3	4	4	3	4	4	4	33 36
20	4	4	4	4	4			4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36 36
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
23	4	4	4	0	4	4	4	4	4	32
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	3	3	4	3	3	4	4	4	32
26	3	3	3	4	4	3	3	3	4	30
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	3	4	3	4	4	3	4	3	4	32
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
42	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
43	3	3	3	4	3	4	3	4	3	30
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
45	4	4	3	4	3	3	4	4	3	32
46	2	2	2	3	2	2	1	2	1	17
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
48	4	3	3	4	4	4	4	3	3	32
49	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
50	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
53	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
54	4	4	3	4	3	3	4	4	3	32
55	4	4	4	4	4	4	-4	4	4	36
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36







# Pengolahan Data SKM

Nomor			0		Pertanyaai					Σ
Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	. 80.
59	3	3	3	4	3	3	4	4	3	30
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
61	4	4	4	0	4	4	4	4	4	32
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
67	4	3	3	3	3	3	3	2	3	27
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
75	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
76	4	4	2	4	3	4	4	4	4	33
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
79	4	4	4	0	3	4	4	4	3	30
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
85	4	4	4	0	0	3	4	4	3	26
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
87	0	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
94	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
100	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
102	4	3	3	4	3	4	4	4	3	32
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
∑nilai/unsur	3,673	3,587	3,567	3,577	3,548	3,606	3,731	3,712	3,673	32,673
NRR/unsur	0,4081	0,3985	0,3964	0,3974	0,3942	o,4006 akat	0,4145	0,4124	0,4081	<b>E</b>
- 11	ideks	0.50			37.5	anac		•	-	
		ATHE POR	7+0-0-0-0-0	ayana					A	
	K	inerja	Unit	Pelay	anan			Sar	ıgat I	Baik



# Saran dan Masukan Responden





### Responden 12

Saya mahasiswa, waktu kunjungan ke Bappeda, saya sudah membawa surat pengantar dari KLHK untuk keperluan penelitian atau sekedar bertemu dan berbincang ke Bappeda. Tapi pas sampai kantor, jutek banget karyawan disana, ga disuruh duduk dan ga disapa ramah.

### Responden 32



Pelayanan masyarakat lebih dipermudah lagi



### Responden 70

Tiap tahun ada pelatihan peningkatan kapasitas perencana

Responden 64



Harus lebih on time.



# Rencana Tindak Lanjut



NO	PRIORITAS	DDOC /VEC		Tah	un 2	024		DIC
NO	UNSUR	PROG/KEG	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	PIC
1	Persyaratan	Menyediakan informasi terkait persyaratan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan dipublikasikan media elektronik/non elektronik	*					SEKRETARIAT PERENCANAAN, SEMUA BIDANG
2	Prosedur	Melaksanakan review/monev terhadap prosedur pelayanan Bappeda			*			SEMUA BIDANG
3	Waktu Pelayanan	Pelayanan di dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan				<b>*</b>		SEKRETARIAT PERENCANAAN, SEMUA BIDANG
4	Biaya/Tarif	Menginformasikan dan mempublikasikan bahwa pelayanan di Bappeda tidak dipungut biaya/gratis					*	SEKRETARIAT PERENCANAAN, SEMUA BIDANG
5	Produk Pelayanan	Menyediakan informasi produk pelayanan Bappeda berupa infografis agar mudah dipahami masyarakat		*				SEKRETARIAT PERENCANAAN
6	Kompetensi Petugas	Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan Memberikan reward/punishment dalam meningkatkan disiplin pegawai				*		SEKRETARIAT, SEMUA BIDANG
7	Perilaku Pelaksana	Melakukan evaluasi secara berkala disampaikan pada saat breefing				*	*	SEKRETARIAT, SEMUA BIDANG
8	Penanganan Pengaduan	Meningkatkan kemudahan akses untuk penyampaian aduan melalui media online, website dan instagram			*			SEKRETARIAT PERENCANAAN
9	Sarana dan Prasarana	Menambah sarana dan prasarana ruang pelayanan				*		SEKRETARIAT UMPEG,



# Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Publik Bappeda Kabupaten Bekasi pada Semester 1 Tahun 2024 diketahui pada unsur Perilaku Pelaksana (rata-rata 3,731/93,26), sedangkan unsur dengan NRR terendah pada unsur Produk Pelayanan (rata-rata 3,548/88,70).

Angka ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan paling tinggi pada Perilaku Pelaksana, sedangkan pada Produk Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah.



08 \*\*\*



# Hasil Tindak Lanjut



NO	RENCANA TINDAK LANJUT	JANGKA WAKTU	RUANG LINGKUP	HASIL IMPLEMENTASI	STATUS	%
1	Menyediakan informasi terkait persyaratan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan dipublikasikan media elektronik/non elektronik	1 bulan	Pelayanan	Publikasi informasi SOP Pelayanan Bappeda melalui website	Telah dilaksanakan pada Mei 2024	100%
2	Melaksanakan review/monev terhadap prosedur pelayanan Bappeda	1 bulan	1 Kegiatan	Pelaksanaan review/ monev prosedur pelayanan Bappeda pada Breefing Pegawai	Telah dilaksanakan pada Juli 2024	100%
3	Pelayanan di dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan	1 minggu	1 Kegiatan	Evaluasi terkait ketepatan waktu pelayanan melalui arahan Kepala Badan pada breefing pegawai	Telah dilaksanakan pada Agustus 2024	100%
4	Menyediakan informasi produk pelayanan Bappeda berupa infografis agar mudah dipahami masyarakat	2 minggu	1 Publikasi	Publikasi data hasil Pembangunan pada media online Website/Instagram Bappeda	Telah dilaksanakan pada Juni 2024	100%
5	Menginformasikan dan mempublikasikan bahwa pelayanan di Bappeda tidak dipungut biaya/gratis	2 minggu	1 Publikasi	Publikasi melalui media online bahwa Pelayanan di Bappeda tidak dipungut biaya (gratis)	Telah dilaksanakan pada September 2024	100%
6	Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan Memberikan reward/punishment dalam meningkatkan disiplin pegawai	2 bulan	2 bimbingan teknis	Pelaksanaan Bimtek Peningkatan kualitas petugas perencanaan (Regsosek), Bimtek Cascading dan RPJMD Teknokratik	Telah dilaksanakan pada Juli dan April 2024	100%



NO	RENCANA TINDAK LANJUT	JANGKA WAKTU	RUANG LINGKUP	HASIL IMPLEMENTASI	STATUS	%
7	Melakukan evaluasi secara berkala disampaikan pada saat breefing	1 bulan	1 Kegiatan	Evaluasi terkait perilaku petugas pelayanan melalui arahan Kepala Badan pada breefing pegawai	Telah dilaksanakan pada Agustus, September 2024	100%
8	Meningkatkan kemudahan akses untuk penyampaian aduan melalui media online, website dan instagram	1 bulan	1 Kegiatan	Pembuatan fitur saran dan pengaduan pada website, aspirasi pembangunan, saran dan masukan, dan masukan pada SKM	Telah dilaksanakan pada Juli 2024	100%
9	Menambah sarana dan prasarana ruang pelayanan	1 bulan	1 Sarpras	Penyediaan ruang tunggu pelayanan surat menyurat bagi tamu	Telah dilaksanakan pada Agustus 2024	100%

### Persentase tindak lanjut hasil SKM

•••

 $= \frac{Realisasi\ rencana\ tindak\ lanjut}{Jumlah\ rencana\ tindak\ lanjut} \times 100$ 

$$=\frac{9}{9} \times 100$$

**= 100%** 



09. \*\*\*

# Kesimpulan

- Ol. Secara umum kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunany. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh pada 9 unsur pelayanan adalah 90,75 Sangat Baik.
- **02.** Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah unsur Perilaku Pelaksana (3,731/93,26), dan dianggap paling rendah adalah unsur Produk Pelayanan (rata-rata 3,548/88,70).
- Masukan dan saran yang terkait dengan perbaikan pelayanan seperti penyediaan ruang tunggu tamu di lantai 2, menyediakan informasi pelayanan bappeda, melakukan bimtek perencanaan, dan melakukan evaluasi terhadap petugas pelaksana terkait perilaku petugas sudah bisa langsung diselesaikan.
- Dari 9 rekomendasi atas rencana tindak lanjut yang telah dijelaskan pada tabel tindaklanjut evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Bekasi telah menindaklanjuti 100% dari seluruh masukan evaluasi dari responden SKM.



### Dokumentasi Tindak Lanjut Perbaikan Indikator

### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

### Persyaratan

 Publikasi informasi SOP Pelayanan Bappeda melalui website

		NA PERCANA RETUR PERMETER DERRORS (REPT): Track Mileton				T. Springer		
-	-	-	-	Designation of the last of the	to beauty		-	and -
					CD.	-	-	-
	Contract Con				¢.		-	
1	Total Comment Supplies of the				ф	The same of	-	-
1					中	-	-	-
			100			-	-	Taken .
	Section 1					-	-	
				Ů-		-	-	
•					9	-	-	-



### Prosedur Pelayanan

 Pelaksanaan review/ monev prosedur pelayanan Bappeda pada Breefing Pegawai





### Waktu Penyelesaian

 Evaluasi terkait ketepatan waktu pelyanan melalui arahan Kaban pada pada breefing pegawai





### Biaya/Tarif

 Meningkatkan kemudahan akses untuk penyampaian Aduan melalui media online pada Website Bappeda dan instagram



### Produk Pelayanan

 Publikasi data hasil Pembangunan pada media online Website/Instagram Bappeda





 $\bullet \bullet \bullet$ 

### Dokumentasi Tindak Lanjut Perbaikan Indikator

### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

### Kompetensi Pelaksana

- Bimtek Regsosek
- Bimtek Cascading dan RPJMD Teknokratik





#### Perilaku Pelaksana

 Evaluasi terkait perilaku petugas pelayanan melalui arahan Kepala Badan pada breefing pegawai





### Penanganan Pengaduan

 Pembuatan fitur saran dan pengaduan pada website, aspirasi pembangunan, saran dan masukan pada SKM





#### Sarana dan Prasarana

 Penyediaan ruang tunggu pelayanan surat menyurat bagi tamu









